MJPA : Musamus Journal of Public Administration
Volume 9. No. 1. (Oktober, 2026), hlm 243 - 259
ISSN/pISSN:2622917X/26226499

Hubungan Persepsi Masyarakat tentang Implementasi Kebijakan BPBD dengan Kesiapsiagaan Bencana di Kota Padang Panjang

Sri Rahayu Putri Gusva[1*]; Zikri Alhadi[2]

[1]Univesitas Negeri Padang, Padang, Indonesia ; putrigusvasrirahayu@gmail.com
[2]Univesitas Negeri Padang, Padang, Indonesia ; zikrialhadi@fis.unp.ac.id
* Correspondence : putrigusvasrirahayu@gmail.com

ABSTRAK

Kota Padang Panjang memiliki potensi bencana alam sehingga kesiapsiagaan masyarakat menjadi aspek penting dalam upaya penanggulangan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang Panjang, tingkat kesiapsiagaan masyarakat, serta hubungan antara kedua variabel tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif serta regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS. Persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan dianalisis berdasarkan teori George C. Edward III, yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara itu, kesiapsiagaan masyarakat mencakup pengetahuan dan sikap, kebijakan dan panduan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan dini, serta mobilisasi sumber daya. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa disposisi memperoleh skor rata-rata tertinggi sebesar 20,52 pada variabel implementasi kebijakan, sedangkan pengetahuan dan sikap memperoleh skor rata-rata tertinggi sebesar 20,64 pada variabel kesiapsiagaan. Hasil regresi menunjukkan koefisien sebesar 0,887 dengan nilai signifikansi $p < 0,001$ dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,612. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan BPBD berhubungan positif dan signifikan secara statistik dengan skor kesiapsiagaan masyarakat. Model regresi menjelaskan 61,2% variasi skor kesiapsiagaan dalam sampel, sedangkan 38,8% sisanya berkaitan dengan faktor-faktor di luar model. Namun, hasil penelitian perlu ditafsirkan secara hati-hati karena responden dipilih secara purposif dan kedua variabel diukur melalui persepsi responden yang sama. Oleh karena itu, temuan ini tidak dapat langsung digeneralisasikan kepada seluruh masyarakat atau digunakan untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat.

Kata kunci: *bencana, implementasi kebijakan, kesiapsiagaan masyarakat, penanggulangan bencana*

.

ABSTRACT

Padang Panjang City is exposed to natural disaster risks, making community preparedness essential for effective disaster management. This study aims to examine public perceptions of the implementation of disaster management policies by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Padang Panjang City, assess community preparedness, and analyze the relationship between these variables. A quantitative survey was conducted involving 100 respondents selected through purposive sampling. Data were collected using questionnaires and analyzed through descriptive statistics and simple linear regression using SPSS. Policy implementation was assessed based on George C. Edward III's framework, comprising communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Community preparedness was measured through knowledge and attitudes, policies and guidelines, emergency response plans, early warning systems, and resource mobilization. The descriptive results showed that disposition had the highest mean score for policy implementation (20.52), while knowledge and attitudes had the highest mean score for community preparedness (20.64). Regression analysis yielded a coefficient of 0.887, a significance level of $p < 0.001$, and a coefficient of

determination (R^2) of 0.612. These findings indicate a positive and statistically significant relationship between public perceptions of BPBD policy implementation and community preparedness scores. The regression model explains 61.2% of the variation in preparedness scores within the sample, while the remaining 38.8% is associated with factors outside the model. However, the findings should be interpreted cautiously because purposive sampling limits generalizability, and both variables were measured using self-reported data from the same respondents. Therefore, the results do not establish a causal relationship
Keywords: *community preparedness, disaster, disaster management, policy implementation*

Pendahuluan/ Introduction

Indonesia memiliki kondisi geografis dan geologis yang menyebabkan sejumlah wilayahnya rentan terhadap berbagai jenis bencana alam. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang menghadapi ancaman bencana, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan banjir bandang (Erpani & Sya, 2024). Kondisi tersebut menjadikan penanggulangan bencana sebagai aspek penting dalam perlindungan masyarakat, terutama melalui upaya pencegahan, mitigasi, dan peningkatan kesiapsiagaan. Penanggulangan bencana tidak hanya berkaitan dengan tindakan ketika bencana terjadi, tetapi juga mencakup upaya sebelum bencana untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali risiko, memahami informasi peringatan, dan menentukan tindakan yang perlu dilakukan ketika menghadapi keadaan darurat.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam pelaksanaannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berperan dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana di tingkat daerah, termasuk pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Pelaksanaan kebijakan tersebut memerlukan komunikasi yang efektif, dukungan sumber daya, komitmen pelaksana, serta koordinasi yang jelas. Selain itu, keterlibatan masyarakat diperlukan agar informasi dan program kebencanaan dapat dipahami serta dimanfaatkan oleh kelompok yang menjadi sasaran kebijakan. Oleh karena itu, penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana perlu memperhatikan pengalaman dan persepsi masyarakat yang menerima informasi maupun pelayanan kebencanaan (M. Yusuf, 2022).

Kota Padang Panjang merupakan salah satu wilayah di Sumatera Barat yang menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan tanah longsor. Kondisi geografis berupa kawasan pegunungan dan perbukitan serta curah hujan yang tinggi menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya pengurangan risiko bencana (Ristrini et al., 2012). Kota Padang Panjang terdiri atas dua kecamatan, yaitu Padang Panjang Barat dan Padang Panjang Timur, dengan 16 kelurahan. Karakteristik wilayah tersebut menjadikan penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Penyampaian informasi kebencanaan, edukasi, simulasi, serta penyediaan akses terhadap informasi peringatan dini menjadi bagian penting dalam mendukung kesiapsiagaan masyarakat.

Ancaman bencana di Kota Padang Panjang terlihat dari kejadian banjir pada 11 Mei 2024. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tanggal 12 Mei 2024, hujan dengan intensitas tinggi dan meluapnya Sungai Lubuk Mata Kucing memicu

banjir yang berdampak pada Kelurahan Pasar Usang dan Silaing Bawah di Kecamatan Padang Panjang Barat serta Kelurahan Sigando dan Ekor Lubuk di Kecamatan Padang Panjang Timur. Laporan awal BNPB mencatat tiga orang hilang dalam proses pencarian, enam rumah terdampak, dan dua warung terseret arus. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa dua rumah di sekitar aliran Batang Aia Sangkua hanyut dan akses jalan dari Simpang Lubuk Mata Kucing menuju Nagari Singgalang, Kabupaten Tanah Datar, terputus akibat banjir. Kejadian ini memperlihatkan bahwa bencana dapat mengancam keselamatan masyarakat, merusak tempat tinggal dan usaha, serta mengganggu akses transportasi.

Ancaman tersebut kembali terlihat pada akhir November 2025 ketika hujan dengan intensitas tinggi memicu banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera Barat, termasuk Kota Padang Panjang. Dalam laporan situasi yang diterbitkan pada 28 November 2025 pukul 16.00 WIB, BNPB mencatat enam korban meninggal dunia di Kota Padang Panjang akibat rangkaian bencana tersebut. Pada laporan perkembangan situasi tanggal 30 November 2025, jumlah korban meninggal yang tercatat di kota tersebut meningkat menjadi tujuh orang (Maya Meili, 2025). Angka tersebut merupakan data berdasarkan waktu pelaporan masing-masing dan perlu dibaca sesuai tanggal pemutakhiran. Kejadian pada 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa ancaman bencana di Kota Padang Panjang telah menimbulkan dampak nyata terhadap keselamatan masyarakat. Kondisi ini memperkuat pentingnya kesiapsiagaan masyarakat serta pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dapat menjangkau kelompok masyarakat di wilayah rawan.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, keberadaan kebijakan dan program BPBD perlu dilihat tidak hanya dari kegiatan yang direncanakan, tetapi juga dari bagaimana masyarakat menerima dan menilai pelaksanaannya. Beberapa aspek yang relevan untuk dikaji meliputi kejelasan informasi kebencanaan, akses terhadap edukasi dan simulasi, ketersediaan sarana pendukung yang dapat diakses masyarakat, serta koordinasi dalam penyampaian informasi. Masyarakat mungkin memiliki pengalaman yang berbeda dalam menerima sosialisasi, memperoleh informasi peringatan, atau mengikuti kegiatan kesiapsiagaan. Oleh karena itu, persepsi masyarakat dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan kebijakan dipahami oleh kelompok sasaran. Namun, persepsi tersebut tidak secara langsung menggambarkan seluruh kondisi internal BPBD, seperti anggaran, jumlah aparatur, kewenangan, dan prosedur operasional.

Kesiapsiagaan masyarakat merupakan aspek penting dalam pengurangan risiko bencana karena masyarakat menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan ancaman di lingkungan tempat tinggalnya. Kesiapsiagaan tidak hanya mencakup pengetahuan tentang jenis dan risiko bencana, tetapi juga kemampuan memahami panduan, menyusun rencana tanggap darurat, memperoleh informasi peringatan dini, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Masyarakat yang memahami tindakan yang perlu dilakukan ketika menghadapi ancaman diharapkan dapat mempersiapkan diri dan merespons keadaan darurat secara lebih terarah. Meskipun demikian, kesiapsiagaan juga berkaitan dengan berbagai faktor lain, seperti pengalaman menghadapi bencana, karakteristik individu, kondisi lingkungan, akses informasi, dan dukungan sosial. Dengan demikian, hubungan antara persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan BPBD dan kesiapsiagaan masyarakat perlu dikaji secara empiris tanpa mengasumsikan bahwa keduanya memiliki hubungan sebab-akibat (Cimahi, 2025). Secara teoritis, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat dimensi, yaitu

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Hidayati et al., n.d.). Keempat dimensi tersebut memberikan kerangka untuk memahami aspek pelaksanaan kebijakan yang dapat diamati atau dirasakan oleh masyarakat. Komunikasi berkaitan dengan kejelasan, konsistensi, dan penyampaian informasi kebencanaan kepada kelompok sasaran. Informasi yang jelas dan mudah dipahami dapat membantu masyarakat mengenali risiko, memahami peringatan, dan mengetahui tindakan yang perlu dilakukan ketika terjadi bencana. Sumber daya berkaitan dengan dukungan tenaga, fasilitas, informasi, dan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan program. Dalam konteks kebencanaan, ketersediaan sumber daya dapat mendukung penyelenggaraan sosialisasi dan simulasi serta penyediaan sarana komunikasi dan peringatan dini.

Dimensi disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Pelaksanaan edukasi yang konsisten dan berkelanjutan dapat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan meningkatkan pemahaman mengenai tindakan kesiapsiagaan. Sementara itu, struktur birokrasi mencakup pembagian tugas, prosedur, dan mekanisme koordinasi antarpihak yang terlibat. Pembagian tugas dan koordinasi yang jelas dapat mendukung konsistensi penyampaian informasi, pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, dan penyaluran peringatan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, keempat dimensi tersebut diukur berdasarkan persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan BPBD, bukan sebagai pengukuran langsung terhadap keseluruhan kinerja kelembagaan BPBD. Hubungan yang dijelaskan secara teoritis tersebut menjadi dasar untuk menguji apakah skor persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan berkaitan dengan skor kesiapsiagaan mereka. Pengukuran kesiapsiagaan masyarakat dalam penelitian ini mengacu pada indikator LIPI–UNESCO/ISDR, yang meliputi pengetahuan dan sikap terhadap bencana, kebijakan dan panduan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan dini, serta mobilisasi sumber daya (Hidayati et al., n.d.). Pengetahuan dan sikap berkaitan dengan pemahaman masyarakat mengenai ancaman serta tindakan yang perlu dilakukan. Kebijakan dan panduan berhubungan dengan pemahaman terhadap pedoman yang dapat digunakan dalam menghadapi bencana. Rencana tanggap darurat mencakup persiapan tindakan, jalur evakuasi, dan kebutuhan dasar. Sistem peringatan dini berkaitan dengan kemampuan menerima serta memahami informasi peringatan, sedangkan mobilisasi sumber daya mencakup kesiapan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung tindakan darurat. Kelima indikator tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran kesiapsiagaan masyarakat secara lebih menyeluruh.

Tabel 1 operasionalisasi variabe

Variabel	Dimensi	Indikator	Nomor Butir	Jumlah	Skala	Sumber
Implementasi Kebijakan BPBD (X)	Komunikasi	Kejelasan dan penyampaian informasi kebencanaan	1–5	5	Likert	Edward III
	Sumber daya	Ketersediaan informasi, sarana, dan dukungan kebencanaan	6–10	5	Likert	Edward III
	Disposisi	Komitmen,	11–15	5	Likert	Edward III

Variabel	Dimensi	Indikator	Nomor Butir	Jumlah	Skala	Sumber
		kepedulian, dan responsivitas pelaksana				
	Struktur birokrasi	Kejelasan prosedur dan koordinasi pelaksanaan	16–20	5	Likert	Edward III
Kesiapsiagaan Masyarakat (Y)	Pengetahuan dan sikap	Pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap bencana	1–5	5	Likert	LIPI–UNESCO/ISDR
	Kebijakan dan panduan	Pemahaman terhadap kebijakan dan panduan kebencanaan	6-9	4	Likert	LIPI–UNESCO/ISDR
	Rencana tanggap darurat	Kesiapan rencana dan tindakan menghadapi bencana	1--14	5	Likert	LIPI–UNESCO/ISDR
	Sistem peringatan dini	Pemahaman dan akses terhadap informasi peringatan dini	15-19	5	Likert	LIPI–UNESCO/ISDR
	Mobilisasi sumber daya	Kesiapan sumber daya dan kemampuan mobilisasi	20-24	5	Likert	LIPI–UNESCO/ISDR

Model konseptual penelitian ini menggambarkan hubungan antara persepsi masyarakat mengenai implementasi kebijakan BPBD sebagai variabel X dengan kesiapsiagaan masyarakat sebagai variabel Y. Implementasi kebijakan BPBD dioperasionalkan melalui empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara itu, kesiapsiagaan masyarakat diukur melalui indikator kesiapsiagaan yang meliputi pengetahuan dan sikap, kebijakan dan panduan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan dini, dan mobilisasi sumber daya. Berdasarkan kerangka teoritis dan hasil telaah penelitian terdahulu, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_1: Terdapat hubungan positif antara persepsi masyarakat mengenai implementasi kebijakan BPBD dan kesiapsiagaan masyarakat.

H_0: Tidak terdapat hubungan positif antara persepsi masyarakat mengenai implementasi kebijakan BPBD dan kesiapsiagaan masyarakat.

Hipotesis tersebut diuji secara statistik untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kedua variabel. Penggunaan istilah hubungan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hasil analisis tidak dimaksudkan untuk membuktikan hubungan sebab-akibat.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian implementasi kebijakan penanggulangan bencana umumnya menitikberatkan pada pelaksanaan program dan kapasitas kelembagaan, sedangkan penelitian mengenai kesiapsiagaan masyarakat lebih banyak mengkaji pengetahuan, sikap, rencana tanggap darurat, sistem peringatan dini, dan mobilisasi sumber daya. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menghubungkan persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan BPBD dengan kesiapsiagaan masyarakat dalam satu model penelitian masih terbatas. Selain itu, penelitian ini menempatkan implementasi kebijakan sebagai persepsi masyarakat, bukan sebagai penilaian terhadap kondisi internal organisasi BPBD. Posisi tersebut menjadi pembeda penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu dan menjadi dasar dilakukannya pengujian hubungan antara kedua konstruk (Marfuah et al., 2024) mengidentifikasi persoalan yang berkaitan dengan pembiayaan, koordinasi antarlembaga, dan pelaksanaan peran pemerintah daerah. Penelitian (Destia Rahma & Fitriani Yulianti, 2020) juga membahas kendala koordinasi, perbedaan prosedur antarinstansi, keterbatasan pendanaan, kesiapsiagaan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi dalam sistem peringatan dini. Temuan-temuan tersebut memberikan gambaran mengenai berbagai tantangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, temuan mengenai kendala kelembagaan atau kondisi kesiapsiagaan saja belum cukup untuk menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan BPBD berkaitan secara statistik dengan kesiapsiagaan mereka.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dirujuk, kesenjangan penelitian ini terletak pada perlunya mengkaji hubungan antara persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan BPBD dan kesiapsiagaan masyarakat dalam satu kerangka analisis empiris. Penelitian mengenai implementasi kebijakan yang menitikberatkan pada persoalan kelembagaan belum tentu menjelaskan hubungan statistiknya dengan kesiapsiagaan masyarakat. Sebaliknya, penelitian yang menggambarkan kesiapsiagaan masyarakat belum tentu mengukur persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan BPBD menggunakan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara bersamaan. Dalam konteks Kota Padang Panjang, yang menghadapi ancaman banjir dan tanah longsor, pengujian kedua variabel tersebut melalui survei masyarakat dapat memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan dan kesiapsiagaan yang mereka laporkan. Klaim mengenai keterbatasan penelitian terdahulu ini perlu dipastikan melalui penelusuran literatur yang lebih luas dan mutakhir, sehingga kesenjangan yang diajukan tidak hanya didasarkan pada beberapa penelitian yang telah dirujuk.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada masyarakat yang berdomisili di Kota Padang Panjang. Variabel independen (X) adalah persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan BPBD, yang diukur melalui dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Variabel dependen (Y) adalah kesiapsiagaan masyarakat, yang diukur melalui pengetahuan dan sikap, kebijakan dan panduan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan dini, serta mobilisasi sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan BPBD Kota Padang Panjang, menggambarkan kesiapsiagaan masyarakat, serta menguji hubungan statistik antara kedua variabel tersebut. Melalui pendekatan kuantitatif dengan survei terhadap 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, penelitian ini diharapkan

dapat memberikan gambaran empiris mengenai hubungan kedua variabel dalam sampel penelitian dan menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi program kesiapsiagaan bencana. Karena desain penelitian bersifat potong lintang, pemilihan responden dilakukan secara purposif, dan kedua variabel diukur berdasarkan jawaban responden yang sama, hasil penelitian tidak digunakan untuk memastikan hubungan sebab-akibat atau digeneralisasikan secara langsung kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang.

Metode/Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional dan desain survei potong lintang (*cross-sectional*). Penelitian kuantitatif digunakan untuk mengukur variabel penelitian melalui data numerik dan menganalisisnya menggunakan teknik statistik (Sugiyono, 2019). Desain *cross-sectional* berarti pengumpulan data dilakukan pada satu periode tertentu untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang Panjang dan kesiapsiagaan masyarakat. Jenis penelitian korelasional dipilih untuk menguji hubungan statistik antara kedua variabel tersebut, bukan untuk membuktikan hubungan sebab-akibat.

Subjek penelitian adalah masyarakat yang berdomisili di Kota Padang Panjang. Pemilihan responden dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria responden meliputi berusia minimal 17 tahun, berdomisili di Kota Padang Panjang, mengetahui atau pernah memperoleh informasi mengenai kegiatan kebencanaan di wilayah tersebut, serta bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Berdasarkan pertimbangan kebutuhan analisis dan keterjangkauan pengumpulan data, penelitian ini melibatkan 100 responden. Karena menggunakan teknik *purposive sampling*, pemilihan responden tidak dilakukan secara acak sehingga hasil penelitian perlu ditafsirkan sesuai dengan karakteristik sampel dan tidak secara otomatis digeneralisasikan kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang (Retni et al., 2023). Sementara itu, kesiapsiagaan masyarakat dilihat dari pengetahuan tentang bencana, rencana tanggap darurat, sistem peringatan dini, dan mobilisasi sumber daya.

Objek penelitian terdiri atas persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan BPBD Kota Padang Panjang sebagai variabel independen (X) dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sebagai variabel dependen (Y). Variabel X diukur berdasarkan empat dimensi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pengukuran variabel ini didasarkan pada penilaian atau persepsi responden terhadap informasi dan kegiatan kebencanaan yang mereka ketahui atau alami. Sementara itu, variabel Y diukur berdasarkan aspek pengetahuan dan sikap terhadap bencana, kebijakan dan panduan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan dini, serta mobilisasi sumber daya.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner yang digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan BPBD dan tingkat kesiapsiagaan mereka. Data sekunder diperoleh dari dokumen dan laporan BPBD Kota Padang Panjang,

data statistik kebencanaan, peraturan terkait penanggulangan bencana, buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Kuesioner diberikan kepada responden menggunakan skala Likert dengan rentang skor 1 sampai 5 sesuai dengan pilihan jawaban pada setiap pernyataan. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi pendukung mengenai kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, serta kegiatan kebencanaan yang dapat diamati. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan laporan, arsip, foto, data statistik, dan dokumen resmi yang relevan dengan penanggulangan bencana di Kota Padang Panjang.

Analisis data dilakukan dengan bantuan program SPSS. Tahapan analisis meliputi analisis deskriptif, regresi linear sederhana, uji t, dan koefisien determinasi (R^2). Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden serta distribusi jawaban dan nilai statistik masing-masing variabel. Regresi linear sederhana digunakan untuk menguji hubungan statistik antara persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan BPBD (X) dan kesiapsiagaan masyarakat (Y). Uji t digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi, sedangkan koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui proporsi variasi skor kesiapsiagaan masyarakat yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Hasil analisis ditafsirkan sebagai hubungan statistik dan tidak digunakan untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat.

Sebelum analisis utama dilakukan, instrumen penelitian diuji melalui uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan menggunakan *Corrected Item-Total Correlation*, sedangkan reliabilitas instrumen diuji menggunakan Cronbach's Alpha (Leofano, 2016). Pengujian ini bertujuan untuk menilai validitas setiap butir pernyataan serta konsistensi internal instrumen dalam mengukur variabel penelitian.

.

Hasil dan Pembahasan/ Result and Discussion

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Padang Panjang merupakan wilayah dataran tinggi di Provinsi Sumatera Barat dengan luas sekitar 23 km^2 dan ketinggian 550–900 meter di atas permukaan laut. Wilayahnya diapit oleh Gunung Marapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandikat serta memiliki topografi perbukitan dan curah hujan yang tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan Kota Padang Panjang memiliki berbagai potensi bencana, seperti gempa bumi, tanah longsor, erosi, banjir bandang (*galodo*), serta ancaman aktivitas vulkanik berupa erupsi dan abu vulkanik.

Dalam menghadapi berbagai ancaman tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang melalui BPBD melaksanakan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Upaya yang dilakukan antara lain pembentukan dan pembinaan Kelompok Siaga Bencana (KSB), pelaksanaan simulasi tanggap darurat, pemantauan kawasan rawan bencana, penyiapan logistik, serta penguatan sistem kaji cepat. Berbagai kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan mengurangi risiko korban maupun kerugian akibat bencana.

2. Karakteristik Responden

Setelah dilakukan penelitian terdapat 63 orang dengan jenis kelamin laki laki yang melakukan pengisian kuesioner, dan 37 orang perempuan lainnya, dengan jumlah keseluruhan totalnya adalah 100 responden berdasarkan tabel berikut :

Tabel 2 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi(f)	Persentase(%)
1	Laki-laki	63	63%
2	Perempuan	37	37%
Total		**100**	**100%**

Berdasarkan karakteristik usia, dari 100 responden, mayoritas berada pada kelompok usia 17–25 tahun sebanyak 66 orang (66%). Selanjutnya, responden berusia 26–35 tahun sebanyak 16 orang (16%), 46–55 tahun sebanyak 9 orang (9%), 36–45 tahun sebanyak 6 orang (6%), dan lebih dari 55 tahun sebanyak 3 orang (3%). Dengan demikian, responden penelitian didominasi oleh kelompok usia 17–25 tahun.

Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No.	Kelompok Usia	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	17–25 tahun	66	66%
2	26–35 tahun	16	16%
3	36–45 tahun	6	6%
4	46–55 tahun	9	9%
5	>55 tahun	3	3%
Total		**100**	**100%**

Berdasarkan tempat tinggal, 100 responden berasal dari berbagai kelurahan di Kota Padang Panjang. Responden terbanyak berasal dari Kelurahan Tanah Hitam sebanyak 10 orang, diikuti Kampung Manggis dan Pasar Usang masing-masing 8 orang, serta Guguk Malintang dan Balai-Balai masing-masing 7 orang. Responden dari Padang Panjang Timur berjumlah 14 orang setelah penggabungan dua data pada tabel. Sementara itu, kelurahan lainnya memiliki jumlah responden antara 1–5 orang. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa responden berasal dari berbagai wilayah yang menjadi cakupan penelitian.

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tempat Tinggal

No.	Kecamatan	Jumlah Responden
1	Padang Panjang Barat	60
2	Padang Panjang Timur	40
	Total yang dapat diidentifikasi	**100**

Berdasarkan Tabel tersebut, diketahui bahwa responden penelitian berasal dari dua kecamatan di Kota Padang Panjang, yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Dari total 100 responden, sebanyak 60 responden (60%) berdomisili di Kecamatan Padang Panjang Barat, sedangkan 40 responden (40%) berdomisili di Kecamatan Padang Panjang Timur. Data tersebut menunjukkan bahwa responden lebih banyak berasal dari Kecamatan Padang Panjang Barat dibandingkan dengan Kecamatan

Padang Panjang Timur. Penyebaran responden pada kedua kecamatan tersebut memberikan gambaran bahwa penelitian melibatkan masyarakat dari wilayah Kota Padang Panjang secara lebih luas.

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Tinggal Di Padang Panjang

No.	Lama Tinggal	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	< 1 tahun	9	9%
2	1–5 tahun	20	20%
3	6–10 tahun	28	28%
4	11–20 tahun	7	7%
5	>20 tahun	36	36%
Total		**100**	**100%**

3. Hasil Uji Intrumen

a. Uji Validitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel implementasi kebijakan BPBD (X) dan kesiapsiagaan masyarakat (Y) dinyatakan valid. Pada variabel X, nilai r-hitung berada pada rentang 0,687–0,865, sedangkan variabel Y memiliki nilai r-hitung antara 0,629–0,865. Seluruh nilai tersebut lebih besar daripada r-tabel sebesar 0,197 dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05. Dengan demikian, sebanyak 20 item pada variabel X dan 24 item pada variabel Y memenuhi kriteria validitas dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnyasesuai dengan tabel berikut :

Tabel 6. Uji Validitas Variabel X dan Variabel Y

Variabel	Jumlah Item	Rentang r-hitung	r-tabel	Sig.	Keterangan
Implementasi Kebijakan BPBD (X)	20	0,687–0,865	0,197	0,001	Seluruh item valid
Kesiapsiagaan Masyarakat (Y)	24	0,629–0,865	0,197	0,001	Seluruh item valid

b. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang sangat baik. Variabel implementasi kebijakan BPBD (X) yang terdiri dari 20 item pernyataan memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,967, sedangkan variabel kesiapsiagaan masyarakat (Y) yang terdiri dari 24 item memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,970. Kedua nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada masing-masing variabel memiliki konsistensi internal yang sangat baik dan dinyatakan reliabel, sehingga instrumen layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 7. Hasil Uji Reabilas Variabel X (Implementasi Kebijakan BPBD)

No.	Item Pernyataan	R_{Hitung}	R_{Tabel}	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	P1	0,763	0,197	0,001	Valid
2	P2	0,811	0,197	0,001	Valid
3	P3	0,778	0,197	0,001	Valid

No.	Item Pernyataan	R_{Hitung}	R Tabel	Sig. (2-tailed)	Keterangan
4	P4	0,687	0,197	0,001	Valid
5	P5	0,865	0,197	0,001	Valid
6	P6	0,726	0,197	0,001	Valid
7	P7	0,856	0,197	0,001	Valid
8	P8	0,794	0,197	0,001	Valid
9	P9	0,792	0,197	0,001	Valid
10	P10	0,754	0,197	0,001	Valid
11	P11	0,795	0,197	0,001	Valid
12	P12	0,829	0,197	0,001	Valid
13	P13	0,797	0,197	0,001	Valid
14	P14	0,773	0,197	0,001	Valid
15	P15	0,790	0,197	0,001	Valid
16	P16	0,746	0,197	0,001	Valid
17	P17	0,780	0,197	0,001	Valid
18	P18	0,804	0,197	0,001	Valid
19	P19	0,756	0,197	0,001	Valid
20	P20	0,845	0,197	0,001	Valid

Tabel 8 Hasil Uji Reabilas Variabel Y (Kesiapsiagaan Masyarakat)

No.	Item	R_{Hitung}	R Tabel	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	Q1	0,732	0,197	0,001	Valid
2	Q2	0,744	0,197	0,001	Valid
3	Q3	0,732	0,197	0,001	Valid
4	Q4	0,758	0,197	0,001	Valid
5	Q5	0,629	0,197	0,001	Valid
6	Q6	0,756	0,197	0,001	Valid
7	Q7	0,791	0,197	0,001	Valid
8	Q8	0,828	0,197	0,001	Valid
9	Q9	0,764	0,197	0,001	Valid
10	Q10	0,775	0,197	0,001	Valid
11	Q11	0,795	0,197	0,001	Valid
12	Q12	0,757	0,197	0,001	Valid
13	Q13	0,846	0,197	0,001	Valid
14	Q14	0,858	0,197	0,001	Valid
15	Q15	0,823	0,197	0,001	Valid
16	Q16	0,802	0,197	0,001	Valid
17	Q17	0,861	0,197	0,001	Valid
18	Q18	0,817	0,197	0,001	Valid
19	Q19	0,760	0,197	0,001	Valid
20	Q20	0,682	0,197	0,001	Valid
21	Q21	0,717	0,197	0,001	Valid
22	Q22	0,865	0,197	0,001	Valid
23	Q23	0,688	0,197	0,001	Valid
24	Q24	0,744	0,197	0,001	Valid

c. Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel implementasi kebijakan BPBD (X) dan kesiapsiagaan masyarakat (Y) berdasarkan 100 responden disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 9. Analisis Deskripti Variabel X dan Variabel Y

Variabel	Indikator	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Implementasi Kebijakan BPBD (X)	Komunikasi	100	10,00	25,00	19,9000	3,67217
	Sumber Daya	100	10,00	25,00	19,8700	3,67810
	Disposisi/Sikap Pelaksana	100	10,00	25,00	20,5200	3,40077
	Struktur Birokrasi	100	10,00	25,00	20,3300	3,26616
Kesiapsiagaan Masyarakat (Y)	Pengetahuan dan Sikap terhadap Risiko Bencana	100	10,00	25,00	20,6400	3,14794
	Kebijakan dan Panduan	100	8,00	20,00	16,2200	2,61920
	Rencana Tanggap Darurat	100	10,00	25,00	20,3300	3,41137
	Sistem Peringatan Dini	100	10,00	25,00	20,2800	3,32447
	Mobilisasi Sumber Daya	100	10,00	25,00	20,1600	3,37465

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif terhadap 100 responden, variabel implementasi kebijakan BPBD Kota Padang Panjang yang diukur berdasarkan persepsi masyarakat menunjukkan nilai rata-rata per butir yang relatif tinggi pada seluruh indikator. Indikator disposisi atau sikap pelaksana memiliki rata-rata per butir tertinggi, yaitu 4,104, diikuti struktur birokrasi sebesar 4,066, komunikasi sebesar 3,980, dan sumber daya sebesar 3,974. Hasil ini menunjukkan bahwa, berdasarkan penilaian responden, aspek disposisi atau sikap pelaksana memperoleh penilaian relatif paling tinggi, sedangkan sumber daya memperoleh rata-rata per butir paling rendah di antara keempat indikator implementasi kebijakan.

Pada variabel kesiapsiagaan masyarakat, indikator pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana memiliki rata-rata per butir sebesar 4,128. Indikator rencana tanggap darurat memperoleh rata-rata 4,066, sistem peringatan dini sebesar 4,056, kebijakan dan panduan sebesar 4,055, serta mobilisasi sumber daya sebesar 4,032. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penilaian antarindikator kesiapsiagaan relatif berdekatan. Meskipun indikator pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana memiliki rata-rata per butir tertinggi, selisihnya dengan indikator kebijakan dan panduan hanya sekitar 0,073 poin.

Perlu diperhatikan bahwa indikator kebijakan dan panduan terdiri atas empat butir pertanyaan dengan skor maksimum 20, sedangkan indikator kesiapsiagaan lainnya terdiri

atas lima butir dengan skor maksimum 25. Oleh karena itu, perbandingan dilakukan berdasarkan rata-rata per butir, bukan skor total mentah. Berdasarkan ukuran tersebut, data tidak menunjukkan bahwa kebijakan dan panduan merupakan aspek yang paling lemah secara mencolok. Indikator mobilisasi sumber daya justru memiliki rata-rata per butir terendah di antara indikator kesiapsiagaan yang dianalisis. Namun, hasil deskriptif ini hanya menggambarkan kecenderungan jawaban responden dan belum cukup untuk menyimpulkan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik antarindikator.

d. Analisis Linearilitas dan Uji Normalitas

Tabel 10 Hasil Analisis Linearlitas dan Uji Normalitas

Variabel	F	Signifikansi Deviation from Linearity	Keterangan
Implementasi Kebijakan BPBD (X) terhadap Kesiapsiagaan Masyarakat (Y)	1,010	0,477	Linear

Hasil uji linearitas menunjukkan nilai signifikansi pada Deviation from Linearity sebesar 0,477. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terdapat penyimpangan yang signifikan dari hubungan linear. Dengan demikian, hubungan antara Implementasi Kebijakan BPBD Kota Padang Panjang (X) dan Kesiapsiagaan Masyarakat (Y) dinyatakan linear dan memenuhi asumsi linearitas untuk analisis regresi.

Tabel 11 Hasil Uji Linearitas

N	Test Statistic	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
100	0,087	0,060	Normal

Hasil uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test terhadap Unstandardized Residual menunjukkan nilai Test Statistic sebesar 0,087 dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,060. Karena nilai signifikansi 0,060 > 0,05, maka residual dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian, data penelitian memenuhi asumsi normalitas dan dapat dilanjutkan ke analisis regresi linear.

Tabel 12 Hasil uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	26,084	5,830	-	4,474	0,000
Implementasi Kebijakan BPBD (X)	0,887	0,071	0,782	12,425	0,000

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, diperoleh nilai konstanta sebesar 26,084 dan koefisien regresi variabel Implementasi Kebijakan BPBD sebesar 0,887. Dengan demikian, persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = 26,084 + 0,887X. Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, diperoleh nilai konstanta sebesar 26,084 dan koefisien regresi sebesar 0,887. Koefisien yang bernilai positif menunjukkan adanya hubungan positif antara persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan BPBD dan skor kesiapsiagaan masyarakat. Hasil uji t menunjukkan nilai t sebesar 12,425 dengan nilai signifikansi $p < 0,001$. Dengan demikian, terdapat hubungan positif dan signifikan secara statistik antara persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan BPBD dan kesiapsiagaan masyarakat, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik antara Implementasi Kebijakan BPBD Kota Padang Panjang terhadap Kesiapsiagaan Masyarakat. Koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,887 menunjukkan bahwa pengaruh tersebut memiliki arah positif.

Tabel 13. Hasil analisis koefisien determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,782[a]	0,612	0,608	9,104
a. Predictors: (Constant), IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BPBD KOTA PADANG PANJANG				

Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan nilai R sebesar 0,782 dan R Square sebesar 0,612. Nilai R Square tersebut menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan BPBD Kota Padang Panjang mampu menjelaskan 61,2% variasi Kesiapsiagaan Masyarakat, sedangkan 38,8% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,608 menunjukkan koefisien determinasi yang telah disesuaikan dengan model penelitian.

4. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan BPBD Kota Padang Panjang berdasarkan teori George C. Edward III memperoleh penilaian relatif positif. Implementasi kebijakan mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dimensi disposisi memperoleh penilaian relatif tertinggi, sedangkan sumber daya terendah. Perbedaan tersebut menunjukkan variasi persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan, tetapi tidak dapat diartikan sebagai perbedaan pengaruh setiap dimensi terhadap kesiapsiagaan karena analisis dilakukan berdasarkan skor total variabel implementasi kebijakan.

Tingginya penilaian pada dimensi disposisi menunjukkan bahwa masyarakat menilai sikap, komitmen, dan respons pelaksana dalam kegiatan kebencanaan cukup baik. Sementara itu, penilaian sumber daya yang lebih rendah dapat menunjukkan masih adanya keterbatasan yang dirasakan masyarakat dalam memperoleh fasilitas, informasi, sosialisasi, atau dukungan kesiapsiagaan. Namun, temuan tersebut merupakan persepsi masyarakat dan tidak dapat dijadikan bukti bahwa sumber daya BPBD secara objektif tidak memadai.

Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi mengenai risiko bencana, evakuasi, lokasi pengungsian, sistem peringatan dini, dan tindakan saat bencana menjadi bagian penting dalam mendukung kesiapsiagaan. Efektivitas komunikasi tidak hanya ditentukan oleh tersampaikannya informasi, tetapi juga oleh tingkat pemahaman masyarakat. Karena itu, sosialisasi, penggunaan media yang sesuai, bahasa yang mudah dipahami, dan simulasi perlu diperhatikan.

Pada variabel kesiapsiagaan, pengetahuan dan sikap memperoleh penilaian relatif tertinggi, sedangkan mobilisasi sumber daya relatif lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga kemampuan menggunakan sumber daya ketika menghadapi bencana. Oleh karena itu, pengetahuan perlu didukung dengan latihan, rencana tanggap darurat, pemahaman sistem peringatan dini, dan kemampuan mobilisasi sumber daya.

Temuan penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa komunikasi, akses informasi, keterlibatan masyarakat, dan dukungan kelembagaan berkaitan dengan kesiapsiagaan masyarakat. Perbedaannya, penelitian ini secara khusus menghubungkan persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan BPBD dengan kesiapsiagaan masyarakat.

Hasil regresi menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan secara statistik antara persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan BPBD dan kesiapsiagaan masyarakat. Koefisien regresi sebesar 0,887 menunjukkan arah hubungan positif, dengan nilai t sebesar 12,425 dan $p < 0,001$. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,612 menunjukkan bahwa 61,2% variasi skor kesiapsiagaan dalam sampel berkaitan dengan persepsi terhadap implementasi kebijakan BPBD dalam model, sedangkan sisanya berkaitan dengan faktor lain yang tidak dianalisis.

Hasil tersebut tidak dapat digunakan untuk menyatakan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, atau struktur birokrasi secara individual memiliki hubungan tertentu dengan kesiapsiagaan karena keempat dimensi tersebut hanya membentuk skor total implementasi kebijakan. Pengujian masing-masing dimensi memerlukan analisis tambahan secara terpisah. Selain itu, terdapat kemungkinan tumpang tindih indikator, misalnya komunikasi dengan pengetahuan dan sistem peringatan dini, yang dapat memperkuat hubungan statistik antarvariabel.

Kedua variabel juga diukur menggunakan kuesioner dari responden yang sama pada waktu yang sama sehingga terdapat kemungkinan common method bias. Oleh sebab itu, hubungan positif yang ditemukan harus dipahami sebagai hubungan berdasarkan persepsi dan laporan responden, bukan sebagai bukti bahwa implementasi kebijakan secara langsung meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Kesiapsiagaan yang diukur juga merupakan kesiapsiagaan berdasarkan jawaban responden, bukan kemampuan aktual ketika menghadapi bencana.

Karakteristik responden seperti usia, lama tinggal, dan wilayah tempat tinggal dapat berkaitan dengan pengalaman serta akses terhadap informasi kebencanaan. Namun, penelitian ini tidak menguji hubungan karakteristik tersebut dengan kesiapsiagaan sehingga hanya digunakan sebagai data deskriptif.

Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai hubungan persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan BPBD dengan kesiapsiagaan masyarakat di Kota Padang Panjang. Semakin positif persepsi masyarakat terhadap implementasi

kebijakan BPBD, semakin tinggi pula skor kesiapsiagaan yang dilaporkan dalam sampel. Temuan ini dapat menjadi masukan bagi BPBD untuk memperhatikan bagaimana program kebencanaan diterima dan dipahami masyarakat.

Secara keseluruhan, terdapat hubungan positif dan signifikan secara statistik antara persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan BPBD dan kesiapsiagaan masyarakat. Namun, desain penelitian yang bersifat potong lintang, penggunaan purposive sampling, penggunaan kuesioner dari responden yang sama, serta kemungkinan tumpang tindih indikator membatasi penarikan kesimpulan kausal. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sumber data yang lebih beragam serta mengombinasikan kuesioner dengan wawancara, observasi, dan simulasi kebencanaan.

.

Kesimpulan/ Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat hubungan positif dan signifikan secara statistik antara persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan BPBD Kota Padang Panjang dan kesiapsiagaan masyarakat. Responden yang memberikan penilaian lebih positif terhadap implementasi kebijakan cenderung memiliki skor kesiapsiagaan lebih tinggi. Namun, hubungan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai sebab-akibat karena penelitian menggunakan desain cross-sectional. Analisis juga menggunakan skor total kedua variabel sehingga tidak dapat menyimpulkan hubungan individual dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dengan kesiapsiagaan.

Penelitian memiliki keterbatasan berupa penggunaan purposive sampling, dominasi responden usia muda, penggunaan kuesioner dari sumber data yang sama, serta kemungkinan tumpang tindih indikator. Responden berjumlah 100 orang dan berasal dari wilayah Kota Padang Panjang, sehingga karakteristik domisili perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil.

Berdasarkan temuan tersebut, BPBD Kota Padang Panjang dapat memperkuat sosialisasi dan simulasi kebencanaan, terutama terkait akses informasi, sistem peringatan dini, panduan evakuasi, dan mobilisasi sumber daya. Masyarakat juga diharapkan lebih aktif mengikuti kegiatan kebencanaan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel yang lebih beragam, melakukan verifikasi domisili, serta memadukan kuesioner dengan wawancara, observasi, atau simulasi untuk memperoleh gambaran kesiapsiagaan yang lebih objektif dan mengurangi potensi bias metode.

.

.

Referensi

Cimahi, D. I. K. (2025). pengaruh implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat. *JURNAL PRINSIP*, *2*(1980), 452–466.

Destia Rahma, & Fitriani Yulianti. (2020). Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Banjir Di Gampong Cot Bayu Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Pendidikan Geosfer*, *V*(2), 22–31.

Erpani, M. F., & Sya, A. (2024). peran badan penanggulangan bencana daerah (bpbd)

dalam menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan (Studi kasus Desa Juai dan Desa Galumbang). *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, *3*(3), 722–736. https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/JMSDM/article/view/836

Hidayati, W., Hartana, T. P., & Kusumawati, T. (n.d.). *Panduan mengukur tingkat kesiapsiagaan masyarakat dan komunitas sekolah*.

Leofano, F. (2016). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Dan Tsunami Di Kota Padang*. 1–23.

M. Yusuf, S. P. (2022). Implementasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat (Studi Pengembangan Penanggulangan Bencana Desa Tangguh di Desa Boboh Kecamatan Menganti). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, *12*(1), 137–150. https://doi.org/10.31113/jia.v12i1.239

Marfuah, M., Cempaka, S., Risdan Ardiansyah, A., Rahmawati, L., Yunia Rediana, M., & Koswara, R. (2024). Elemen Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, *1*(1), 35–45. https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i1.184

Maya Meili, Z. S. (2025). Analisis Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menanggulangi Bencana Alam Di Indonesia (Studi Pada Bencana Alam Di Sumatera Utara). *Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(2), 1006–1019.

Retni, A., Harismayanti, Sudirman, A. N., & Daud, A. W. (2023). Kajian kesiapsiagaan bencana alam pada masyarakat di Desa Waiwerang Kecamatan Adonara Timur. *Jurnal Keperawatn Muhammadiyah*, *8*(1), 51.

Ristrini, R., Rukmini, R., & Oktarina, O. (2012). Analisis Implementasi Kebijakan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan Di Provinsi Sumatera Barat. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, *15*(1 Jan), 91–102. http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/hsr/article/view/2982%5Cnhttp://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/hsr/article/viewFile/2982/2215

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.Bandung:Alfabeta. In *Bandung:Alfabeta*.